

**PEMAKNAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA
SAMARINDA TAHUN 2021**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

M. ADLI

1801035230

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan
Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Tahun 2021

Nama Mahasiswa : M.ADLI

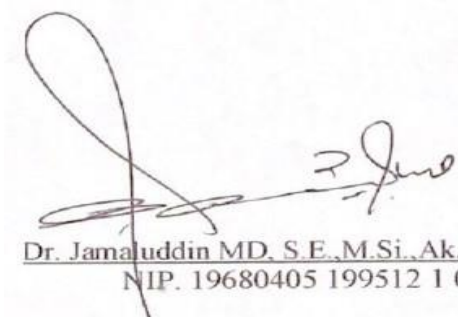
NIM : 1801035230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui
Samarinda, 16 Agustus 2022
Pembimbing,



Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP. 19680405 199512 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah.,M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

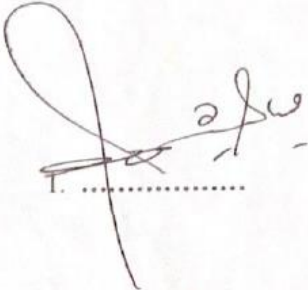
Lulus Tanggal Ujian: 28 Juli 2022

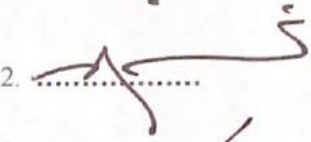
SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS


Judul Penelitian : Pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Tahun 2021
Nama Mahasiswa : M. ADLI
NIM : 1801035230
Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juli 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP. 19680405 199512 1 002
2. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP. 19701018 199512 2 001
3. Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP
NIP. 19770328 200312 2 001

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

ABSTRAK

M. Adli, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian data tersebut diantaranya data Laporan Realisasi Anggaran, dokumentasi, wawancara, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, teknik analisis deskriptif adalah teknik analisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan simpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Kota Samarinda telah menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum khususnya Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP No. 71 tahun 2015 secara keseluruhan. Akan tetapi untuk pos surplus/defisit, dan SiLPA/SiKPA tidak dicatat pada pada BNN Kota Samarinda,

Kata Kunci: laporan realisasi anggaran, standar akuntansi pemerintahan, PSAP

ABSTRACT

M. Adli, 2021. This study aims to determine the meaning of the preparation of the Budget Realization Report at the National Narcotics Agency of Samarinda City in 2021. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data used is primary data, namely data taken directly from the object of research, including data from the Budget Realization Report, documentation, interviews, and other supporting notes. Data analysis techniques used descriptive techniques, descriptive analysis techniques were analytical techniques by means of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that the BNN of Samarinda City has presented a budget realization report in accordance with PSAP No. 13 concerning the presentation of the financial statements of the Public Service Agency, in particular the Budget Realization Report based on PP no. 71 years 2015 overall, However, for surplus/deficit posts, and SiLPA/SiKPA are not recorded at the Samarinda City BNN,

Keywords: budget realization report, government accounting standard, PSAP

RIWAYAT HIDUP



M. Adli, lahir pada tanggal 28 Juli 2000 di Muara Jawa dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Haji Muhammad Aini dan ibu Napsiah. Pertama kali memulai pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak di TK PGRI Handil 8 pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 007 Muara Jawa dan lulus pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar SD Negeri 007 Muara Jawa melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Muara Jawa dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Muara Jawa dan menyelesaikan pendidikan sekolah pada tahun 2018.

Melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi tahun 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Jurusan Akuntansi Program S1-Akuntansi. Tahun Tahun 2021 melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata angkatan 47 di Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten KutaiKartenegara.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 Juni 2022



M. ADLI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehinggah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Jenjang S1 program jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Penulis menyadari selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si selaku Rektor dan seluruh Civitas Akademik Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA.,CSRS.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dan selaku dosen wali.
5. Bapak Dr. Jamaluddin MD, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk dan nasehat untuk mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Staf Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu penulis selama perkuliahan dalam hal administrasi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Aini dan Ibu Napsiah yang telah mendidik, memberikan do'a serta dukungan materil maupun non materil yang tidak henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga untuk saudaraku Akhmad Kirom, Ardiansah, dan Ipah Irawati yang tulus memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada kaka-kaka saya yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi Muhammad rezza, Tria Rachirm, Nesti Putri, Muhammad Rendi, Wirmarta, Riyansyah Malik, Nindy pratiwi, dan Nurul Jannah.
9. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis mengerjakan skripsi Rafli Andra, Ridho Pangestu, Mikael Frans Runtu, Reza Arya, Lukfia Nazwa, Muhammad Faizal, Hawati, Muhammad Ibnu, Daniar Samudra, Cintia Pongliku, Sri Hastuti, dan Nurhalisa yang sudah membantu dan menyemangati saya, sehingga penulis jadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN KUKAR 04 Angkatan 47 Universitas Mulawarman Kelurahan Muara Jawa Iilir. Iklas Aditiya, Sheila Riski Pujianti, Maulida Fitrianti, dan Nanda terima kasih atas kerjasamanya selama melaksanakan KKN.
11. Taman-teman Mahasiswa Handil yang sudah membantu saya dan menemani saya selama berkuliah di Universitas Mulawarman.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Samarinda, 28 Juli 2022

Penulis

M. ADLI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Akuntansi Pemerintahan.....	7
2.1.1. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	7
2.2. Anggaran	8
2.2.1. Fungsi Anggaran	9
2.3. Laporan Realisasi Anggaran.....	10
2.3.1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.....	10
2.3.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	13
2.3.3. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.3.4. Periode Laporan Realisasi Anggaran	14
2.3.5. Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.4. Penelitian Terdahulu.....	15
2.5. Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Definisi Oprasional.....	22
3.2. Pendekatan Penelitian.....	22
3.3. Tempat Penelitian	23

3.4. Jenis dan Sumber Data	23
3.5. Metode Pengumpulan Data	24
3.6. Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Hasil dan Pembahasan	28
4.1.1. Gambaran Umum BNN Kota Samarinda	28
4.1.2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	31
4.1.3. Anggaran LRA BNN Kota Samarinda	35
4.1.4. Pendapatan LRA BNN Kota Samarinda	37
4.1.5. Belanja LRA BNN Kota Samarinda	40
4.1.6. Surplus/Defisit LRA BNN Kota Samarinda.....	46
4.1.7. Pembiayaan LRA BNN Kota Samarinda	47
4.1.8. SiLPA/SiKPA LRA BNN Kota Samarinda	48
BAB V PENUTUP.....	55
5.1. SIMPULAN.....	55
5.2. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda Tahun 2021 dengan PSAP No. 13	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	21

DAFTAR SINGKATAN

PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
SAP	: Setandar Akuntansi Pemerintah
APBN/APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah
CLAK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
LPNK	: Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
SiLPA/SiKPA	: Sisal Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BUN/BUD	: Bendaharan Umum Negara/Daerah
BUMN/BUMD	: Badan Usaha Milik Negara/Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika
SAIBA	: Sistem Akuntansi Internal Berbasis AkruaI
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Intansi
LKKL	: Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga
LO	: Laporan Oprasional

LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
KPPN	: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
SKHPN	: Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
BLU	: Badan Layanan Umum
P2M	: Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat
RKA	: Rencana Kegiatan Anggaran
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
PPSPM	: Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	62
Lampiran 3. Format Bentuk Umum Laporan Realisasi Anggaran	79
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda Tahun 2021 dan Anggaranya tahun 2020.....	80
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik pemerintahan Indonesia menetapkan suatu standar akuntansi yang digunakan sebagai acuan dalam membuat dan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor (No) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian membawa suatu perubahan besar dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dengan adanya SAP berdampak pada kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah, sehingga informasi laporan keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut diuraikan dalam 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual yang diatur di dalam PP No 71 Tahun 2010.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan PSAP mewajibkan setiap entitas pelapor untuk upaya melaporkan hasil yang telah dicapai entitas dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi kinerja. PSAP mempunyai dua

belas kerangka konseptual yang mengatur tentang penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintahan, salah satunya adalah PSAP Nomor 13 yaitu tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PSAP nomor 13 tentang Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis. Tujuh laporan keuangan yang disajikan tersebut sangat penting terutama laporan realisasi anggaran, Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen peraturan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi laporan realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan mengenai perbandingan antaran realisasi pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan pada awal tahun (LRA – Kemenkeu Learning Center, n.d.). Laporan realisasi anggaran merupakan komponen yang penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Informasi LRA dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atas perencanaan yang sudah ditetapkan pemerintah Napitupulu *et al*, (2019). Dalam pengelolaan LRA baik yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun lembaga pemerintah harus mengikuti pedoman PSAP No 13.

Menurut Asmianti dan Walandouw, (2015) menyatakan bahwa untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah. Tujuan dari peningkatan kinerja yang baik tersebut untuk mewujudkan *good governance* baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun lembaga-lembaga pemerintahan harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Imanina, (2015) menyatakan bahwa transparansi adalah menyajikan laporan keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah serta ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran narkotika, bahan adiktif, prekursor, dan psikotropika yang beredar secara ilegal di Indonesia. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden (Profil-Badan Narkotika Nasional RI, n.d). BNN mempunyai dasar hukum dalam menjalankan tugasnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis, dan semisintesis yang membuat penurunan kesadaran, daya rangsangan, dan halusinasi.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang terletak di Jalan Anggur Nomor 51A, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 adalah salah satu satuan kerja dari BNN Pusat yang berada di wilayah Kota Samarinda. Lembaga pemerintahan ini sebagai bagian dari penerima Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), wajib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk transparansi sebagai syarat akuntabilitas dalam mendukung transparansi pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sumber daya publik (Gamayuni, 2018). Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap lembaga pemerintahan maka perlunya pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BNN Kota Samarinda (terlampir 3) menunjukkan bahwa dari 5 penyajian pos dalam laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan SiLPA/SiKPA hanya menampilkan 3 dari pos tersebut yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran yang disusun oleh BNN Kota Samarinda tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 13 jika dilihat dari sudut pandang masyarakat umum. Untuk melihat dan meluruskan pemahaman mengenai seberapa sesuai penyusunan laporan realisasi anggaran pada BNN Kota Samarinda dengan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum khususnya

Laporan Realisasi Anggaran serta bagaimana penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada BNN Kota Samarinda tahun 2021 maka penelitian ini dilakukan.

Dari fenomena tersebut penulis ingin mengetahui pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda tahun 2021 demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat yang melihat dan membaca laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda dapat memahaminya. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul penelitian yaitu Pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan laporan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan laporan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu akuntansi sektor publik khususnya ilmu mengenai laporan realisasi anggaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akedemisi, sebagai bahan pembelajaran dalam memahami tentang laporan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

- b. Bagi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, sebagai bahan referensi sekaligus masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan dan penyajian laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan di masa yang mendatang.
- c. Bagi Lembaga-lembaga pemerintah lainnya sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam menyusun khususnya laporan realisasi anggaran agar lebih baik dan benar kedepannya.

3. Manfaat Regulasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan peraturan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 11 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Yuniarti, (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kegiatan penyediaan jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggabungan, klasifikasi, transaksi keuangan pemerintah. Tujuan akuntansi pemerintahan yaitu untuk menginformasikan pengambilan keputusan tentang kejadian ekonomi yang bernilai serta fundamental dan mempersiapkan data tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya, hal ini guna menggapai tujuan pemerintahan dalam transparan dan akuntabilitas (Eriyana, 2019).

2.1.1. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Adapun karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam sistem akuntansi pemerintah, tugas pemerintah yakni harus berorientasi kepada pelayanan umum tidak pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ditemukannya laporan laba serta perlakuan akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Akuntansi pemerintah melaksanakan pembukuan anggaran pada saat anggaran tersebut dicatat.
3. Akuntansi pemerintahan memperbolehkan penggunaan lebih dari satu jenis dana yang diperlukan.
4. Akuntansi pemerintahan tidak memahami perkiraan modal dan laba ditahan dalam laporan posisi keuangan.
5. Sistem akuntansi pemerintah bersifat kaku, hal ini dikarenakan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan.

2.2. Anggaran

Menurut Tooy, (2016) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu perencanaan yang disusun secara teratur meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan yang akan datang. Sedangkan menurut Prasetyo, (2021) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana *financial* yang menyatakan rencana-rencana organisasi dalam melayani masyarakat atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan yang disusun secara teratur untuk

melayani masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan untuk mendatang.

2.2.1. Fungsi Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian, (2015), anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai perencanaan, anggaran berfungsi sebagai perencanaan karena anggaran dapat memilih dan juga merancang rencana di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya ekonomi dan juga tujuan dari suatu pemerintahan serta mengantisipasi ancaman ancaman dimasa mendatang.
2. Sebagai koordinasi, anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan berbagai rencana dan tindakan per unit, hal ini dibutuhkan agar di dalam pemerintah bisa berkerja dengan baik.
3. Sebagai komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi karena di dalam suatu pemerintahan banyak berbagai pihak dan organisasi berkomunikasi dalam penyusunan anggaran negara.
4. Sebagai motivasi, anggaran berfungsi sebagai alat mendorong motivasi para pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang ingin dituju oleh organisasi maupun pemerintahan.
5. Sebagai pengendalian dan evaluasi, anggaran berfungsi sebagai pengendalian dan evaluasi dikarenakan anggaran yang sudah disepakati merupakan komitmen dari pelaksana yang berpartisipasi dalam menyusun anggaran tersebut.

6. Sebagai pendidik, anggaran berfungsi sebagai alat untuk mendidik manajer tentang bagaimana bekerja secara terinci terhadap pusat pertanggungjawaban yang dipimpin serta menghubungkannya dengan pusat pertanggungjawaban lainnya di dalam organisasi yang berhubungan.

2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Basri, (2013) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menginformasikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran tersebut dalam satu periode. Sedangkan menurut Barreto *et al*, (2013) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan pelaporan yang didalamnya berisi informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari entitas serta dibandingkan dengan anggaran mengenai pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan setelah itu dibandingkan dalam satu periode.

2.3.1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71, tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sebagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang digunakan untuk penyajian wajar dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga membandingkan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya dalam satu

periode. Penjelasan lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi hal-hal penjelasan mengenai pelaksanaan anggaran misalnya kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang material dengan anggaran dan realisasinya, dan daftar lebih lanjut mengenai angka-angka yang di anggap perlu untuk dijelaskan maka dijelaskan di CALK. Unsur-unsur laporan realisasi anggaran diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima rekening kas umum Negara/Daerah. Pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur Badan Layanan Umum (BLU). Pada Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Pada Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) salah satunya adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP ini dapat diuraikan sebagai berikut diantaranya:

- a. Pendapatan layanan bersumber dari masyarakat.
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- c. Pendapatan hasil kerja sama.
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kasi.
- e. Pendapatan BLU lainnya.

b. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), akuntansi belanja dikembangkan untuk kebutuhan pengendalian oleh manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan melalui dua cara yang pertama secara langsung dikeluarkan dari Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), dan yang kedua melalui bendahara pengeluaran. Apabila pengeluaran dilakukan dari BUN/BUD maka belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan apabila pengeluaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut, dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih yang terjadi antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi apabila jumlah pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar dari jumlah belanja pada periode tersebut, sebaliknya defisit-LRA terjadi apabila jumlah pendapatan-LRA lebih kecil dari pada jumlah belanja selama satu periode pelaporan tersebut.

d. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibiayai maupun akan

diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah terutama yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus anggaran. Penerimaan atau pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil privatisasi BUMN/BUMD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membayar kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, serta penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD. Penerimaan pembiayaan diakui ketika uang di terima masuk ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat dengan menggunakan azas bruto. Sementara Pengeluaran pembiayaan diakui apabila dikeluarkannya uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

e. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran dalam satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai sisa lebih/kurang pembiayaan pada akhir periode pelaporan nantinya akan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

2.3.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar laporan realisasi anggaran secara umum yaitu untuk menentukan dan menetapkan dasar-dasar pelaporan LRA dalam pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran yakni untuk memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan yang telah disetujui antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.3. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran

PSAP diaplikasikan dalam penyajian LRA yang dirancang dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. PSAP menjadi dasar untuk semua entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh dan menggunakan anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan Negara/Daerah.

2.3.4. Periode Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dilaporkan sekurangnya sekali dalam satu tahun, dalam keadaan tertentu tanggal pelaporan entitas berubah. Laporan realisasi anggaran tahunan dilaporkan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun.

2.3.5. Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Padi, (2019) menyatakan bahwa manfaat LRA berguna untuk memprediksi kinerja pemerintahan di masa mendatang serta menjadi tahapan dalam membangun prekonomian pemerintahan. Dari definisi tersebut laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang berguna untuk merancang mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa yang akan mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan

tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, Laporan realisasi anggaran tersebut tersebut harus melewati tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan hemat.
2. Dilaksanakan sesuai anggarannya (APBN/APBD).
3. Dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan.
4. Dilaksanakan mengikuti Peraturan PSAP.

Keempat proses tersebut sangat penting dalam laporan realisasi anggaran agar pelaporan realisasi anggaran tersebut menjadi relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Paidi (2019) pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan) pada tahun 2019. Mengangkat judul yaitu Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). Penelitian ini menggunakan studi deskriptif, studi deskriptif kualitatif adalah penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data. Untuk teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean J. Champion. Simpulan penelitian ini bahwa kesesuaian penerapan dengan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akruar telah dinilai baik. Penelitian ini dapat diakses melalui sumber yaitu <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7864>.

Kemudian Stefani, (2014) melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2014. Penelitian ini berjudul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai gambaran yang diteliti. Simpulan penelitian ini secara keseluruhan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Penelitian ini bersumber dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/32083>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Irawan, Made, dan Yagivaria, (2016) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 yang mengangkat judul yaitu Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah dilihat secara keseluruhan penerapan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan

Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil nilai keseluruhannya. Penelitian ini dapat diakses melalui <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1374>.

Penelitian selanjutnya dilakukan Utomo dan Elbash, (2016) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif. Simpulan penelitian ini yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No.02, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran. Penelitian ini bersumber <http://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/346>.

Penelitian yang dijadikan referensi selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunday, (2020) pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Riau yang berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah terealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang

melebihi dari yang dianggarkan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Penelitian ini dapat diakses melalui sumber <http://repository.uin-suska.ac.id/27535/>.

Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Paidi (2019)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)	Alat analisis yang digunakan adalah analisis menggunakan daftar checklist dengan rumus Dean.J.Champion.	Bahwa penerapan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan telah dinilai baik.
2	Stefani, (2014)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif	Bahwa secara keseluruhan penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

3	Irawan, Made, dan Yagivaria, (2016)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)	Alat analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif	Bahwa secara keseluruhan Penerapan Penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 dengan hasil nilai keseluruhan.
4	Utomo dan Elbash, (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realsiasi Angaran Berdasarkan PP N0. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	Alat analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

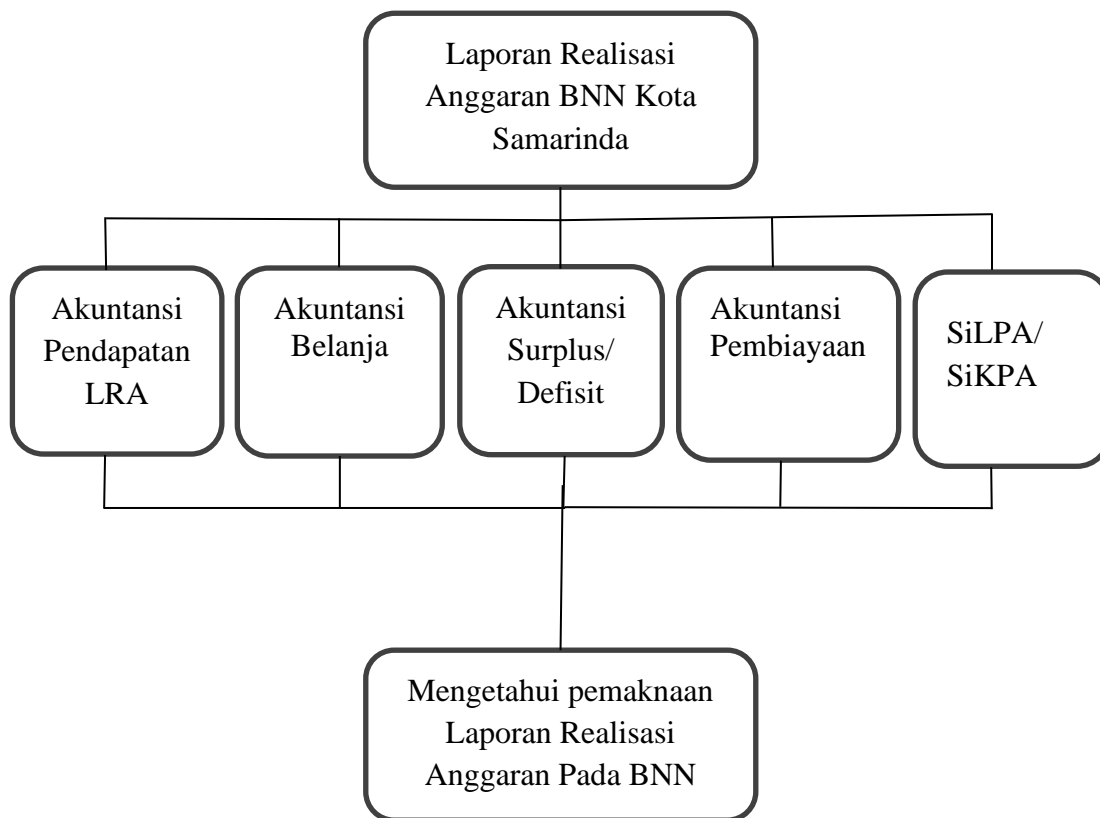
5	Sundry, (2020)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Alat analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah terealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari yang dianggarkan dan penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.
---	-------------------	--	---	---

Sumber: Data olahan, 2022

2.5. Kerangka Konseptual

Penyusunan pelaporan realisasi anggaran yang terdiri dari akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit laporan realisasi anggaran, akuntansi pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda ini dapat penulis teliti dengan kerangka konseptual di bawah ini.

Model kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka konseptual
Sumber: Data olahan, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Oprasional

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar terdapat beberapa indikator yang dapat diteliti, untuk itu diberikan perumusan atau definisi oprasional yaitu sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang berwenang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal psikotropika, precursor, dan bahan adiktif.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda tahun 2021. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang pemaknaan dan pemahaman mengenai penerapan penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP nomor 13 tentang Badan Layanan Umum. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian non hipotesis,

sehingga dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis (Premadi, 2013). Penelitian ini mencari informasi mengenai pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda tahun 2021, diawali dengan mencari informasi mengenai laporan realisasi anggaran dan data-data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini kemudian, menguraikan informasi yang didapat. Setelah itu membandingkan dan menyesuaikan beberapa unsur yang menyangkut Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda dengan PSAP No. 13 tentang penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum khususnya Laporan Realisasi Anggaran.

3.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, Jl. Anggur No.51A, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi. Data deskriptif yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy, 2017). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsi nya.

Sumber data penelitian meliputi gambaran tentang penelitian yang dikumpulkan dan siapa yang akan menjadi pemberi informasi untuk data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer. Data primer merupakan data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mendesain dan menggunakan instrumen penelitian, serta mengolah dan menyajikan data tersebut secara mandiri, jenis data primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Data primer ini yaitu wawancara dan juga data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021 yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Dalam penelitian ini nama informan akan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan informan (Sinambela, 2014).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dengan terjun langsung ke objek penelitian serta mengamati proses yang terjadi di lapangan. Dalam studi lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertatap muka dengan proses tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh informasi. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala BNN Kota Samarinda guna mencari informasi mengenai gambaran umum tentang BNN Kota Samarinda. Kemudian melakukan wawancara kepada bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda dan bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda guna memperoleh data mengenai laporan keuangan

khususnya Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mengetahui bagaimana penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

2. Dokumentasi

(Herdiansyah, 2015) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah salah satu cara alternatif yang dilakukan penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang yang berbeda melalui suatu media tertulis dan dokumen yang lainnya yang ditulis dan dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui analisis dokumen dan tulisan yang dibuat oleh subjek. Untuk penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen berupa data laporan realisasi anggaran dan juga data-data lain pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, yang berkaitan kemudian dianalisis sehingga dapat disimpulkan.

3.6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Caranya yaitu dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis. Adapun data-data yang diperoleh berupa data hasil wawancara, data laporan realisasi anggaran pada tahun 2021, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat disimpulkan.

Terdapat beberapa cara yang penulis lakukan dalam menganalisis data. Langkah-langkah tersebut dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan simpulan (Sugiyono, 2017).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari data wawancara kepada Kepala BNN Kota Samarinda, dan bendahara BNN Kota Samarinda. Kemudian data laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara merangkum informasi yang penting dan diperlukan dalam penelitian. Sehingga informasi yang didapat selama penelitian dapat disederhanakan agar mudah dalam menganalisis data.

3. Sajian Data

Sajian data terdiri dari beberapa informasi yang memungkinkan menjadi simpulan penelitian. Sajian data dapat berupa uraian, bagan, matriks, dan tabel. Semua informasi tersebut disusun secara sistematis agar mudah dalam pemahaman informasi. Peneliti menganalisis pemaknaan penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada BNN Kota Samarinda kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan PSAP No 13 sehingga dapat disimpulkan.

4. Simpulan

Hasil akhir dari suatu penelitian yaitu simpulan, simpulan diharapkan mampu untuk menjawab masalah yang telah dipaparkan sejak awal penelitian. Simpulan tidak

terlepas dari proses sebelumnya karena dalam hal ini simpulan berdasarkan pada seluruh data yang telah diproses mulai awal hingga akhir penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai proses penyusunan laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda di tahun 2021. Penelitian ini dimulai dari tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda di jalan Anggur, Nomor 51A. Kelurahan Sidodadi. Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan secara langsung ke objek penelitian.

4.1.1. Gambaran Umum BNN Kota Samarinda

Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2022 penulis melakukan penelitian terhadap salah satu instansi pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda. Pada hari pertama penelitian penulis melakukan survei terlebih dahulu ke BNN Kota Samarinda sekaligus mengantarkan surat pengantar penelitian. Surat pengantar penelitian ini didapat penulis dari Website <https://akd.feb.unmul.ac.id> yang diharuskan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis bertemu satpam yang berjaga di BNN Kota Samarinda tersebut guna menyampaikan maksud dan tujuan penulis. Setelah itu penulis diarahkan satpam ke ruangan Sub Bagian Umum untuk menyerahkan surat pengantar penelitian.

Surat penelitian tersebut diterima ibu ES selaku karyawan di BNN Kota Samarinda. Beliau cantik, ramah, dan murah senyum dalam melayani penulis “Tunggu sebentar yahh mass suratnya dicek dahulu, silahkan duduk dulu mas dikursi yang sudah disediakan”. Penulis pun duduk di bangku yang disediakan di BNN Kota Samarinda. Setelah dicek surat tersebut diarahkan lagi ke Kepala Sub Bagian Umum yang dijabat oleh Bapak MF. Ibu ES datang ke penulis untuk memberitahukan bahwa permohonan penelitian tersebut diterima dan penulis bisa melakukan penelitian di sini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan, penyalahgunaan, pencegahan, dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, psipkotropika, dan bahan adiktif lainnya terkecuali bahan adiktif seperti tembakau dan alkohol. BNN berada langsung dibawah perintah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BNN mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BNN Kota Samarinda merupakan salah satu satuan kerja dari BNN pusat yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. BNN Kota Samarinda berada di jalan Anggur. Nomor 51A. Kelurahan Sidodadi. Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda. Penulis melakukan obsevasi sebelum memulai penelitian. Observasi tersebut dimulai di lantai satu pada BNN Kota Samarinda, di lantai satu ada ruangan tamu, ruangan Sub Bagian Umum, ruangan Kepala BNN Kota Samarinda, ruangan rapat, sel tahanan sementara, dan juga toilet. Kemudian dilanjutkan dengan menaiki lantai dua untuk melakukan

observasi lanjutan. Ada beberapa ruangan yang terdapat di lantai dua diantaranya ruangan Rehabilitas, ruangan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), ruangan Berantas, klinik BNN Kota Samarinda, dan Mushola. Ruangan-ruangan tersebut sangat bersih dan nyaman terlihat dari aktivitas para pegawai BNN Kota Samarinda yang tampak gembira dalam berkerja.

Penulis memulai penelitian dengan mencari informasi mengenai gambaran umum BNN Kota Samarinda, dengan mengunjungi ruangan kepala BNN Kota samarinda. Penulis masuk ke ruangan Kepala BNN Kota Samarinda dan meminta ijin untuk mewawancarai Kepala BNN Kota Samarinda guna mencari informasi umum mengenai BNN Kota Samarinda. Bapak MD itulah nama beliau, Ketika mendengar maksud dan tujuan penulis beliau tersejyum dan bersedia untuk diwawancarai. Perlakuan beliau terhadap penulis sangat ramah beliau mempersilahkan penulis duduk sambil menghadirkan segelas kopi panas dan makanan ringan guna kebersamaian wawancara. Penulis memulai wawancara dengan menanyakan apa visi dan misi BNN Kota Samarinda. Beliau menjawab sebagai berikut:

“Untuk visi BNN Kota Samarinda itu adalah mewujudkan masyarakat samarinda yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang dan untuk Misi BNN Kota Samarinda itu iyalah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitas, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda”.

Penulis bertanya lagi “Apa saja tugas, fungsi, dan wewenang BNN Kota Samarinda itu sendiri pak?”. Beliau menjawab dengan lantang:

“BNN Kota Samarinda mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Dalam melaksanakan tugas BNN Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi yang pertama. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam wilayah Kota Samarinda, ke 2 melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam wilayah Kota Samarinda, ke 3 melaksanakan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Kota Samarinda, ke 4 melaksanakan koordinasi, ke 5 melakukan pelayanan administrasi BNN Kota Samarinda, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Samarinda”.

Dikarenakan bapak MD sangat sibuk penulis menyudahi wawancara tersebut dengan memohon pamit kepada beliau. Setelah itu penulis pulang ke kosan dikarenakan waktu mendekati jam sholat.

4.1.2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Penulis melakukan kunjungan ke BNN Kota Samarinda yang berikutnya guna mencari informasi dalam penelitian. Kali ini penulis bermaksud mewawancarai Bendahara Penerimaan BNN Kota Samarinda. Ibu MN beliau ramah saat becanda tapi serius saat berkerja bisa dikatakan beliau orangnya sangat profesional. Ketika penulis menyampaikan maksud dan tujuan penulis untuk meminta izin mewawancarai beliau. Beliau mengizinkannya dan menyuruh penulis menunggu di ruangan rapat untuk melakukan wawancara di sana. Penulis menunggu di ruangan tersebut sambil menyiapkan pertanyaan serta alat perekam berupa HP untuk melakukan wawancara. Tidak berlangsung lama akhirnya ibu MN datang ke ruang rapat sambil membawakan minuman.

“Terimakasih banyak bu udah mau diwawancarai, gak osah repot-repot bu ngasih minuman ke saya, seharusnya saya loh bu yang nyiapin minuman buat ibu, ahh jadi gak enak loh bu”.

Ucap kata penulis sambil malu-malu menerima pemberian minuman. Ibu MN tersenyum sambil duduk di samping penulis beliau berkata.

“Ohh yah gak papa ini salah satu bentuk pelayanan dari kami dalam melayani masyarakat, diminum yahh jangan malu-malu, emangnya mau mewawancarai tentang apa sampean ke saya”.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menginformasikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran tersebut dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran bermanfaat untuk memberikan informasi yang berguna untuk merancang mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa yang akan mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi,

Dalam Laporan realisasi anggaran yang disajikan BNN Kota Samarinda untuk tahun 2021. Penulis melihat penyajian laporan realisasi anggaran yang disajikan BNN Kota Samarinda menampilkan 3 pos dalam laporan realisasi anggaran. Pos yang disajikan BNN Kota Samarinda tersebut diantaranya pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan. Menurut peraturan PSAP No. 13 paragraf 18 yang menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya mencakup pos-pos sebagai

berikut pos pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiKPA/SiLPA yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Penulis menjelaskan maksud dan tujuannya tersebut sambil memohon izin untuk merekam wawancara tersebut.

”Jadi begini ibu saya kan melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pemaknaan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Tahun 2021. Saya ingin tau ibu bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada BNN Kota Samarinda”.

Ibu MN menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penulis kepada beliau, beliau berkata.

“Dalam menjalankan intansi BNN Kota Samarinda wajib mempertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangannya. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran. LRA pada BNN Kota Samarinda itu disusun dan disajikan di dalam aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk mencatat transaksi keuangan di beberapa Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAIBA bertujuan untuk menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa transisi/awal implementasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan berkualitas”.

Penulis melihat dalam aplikasi SAIBA yang disusun BNN Kota Samarinda Menampilkan 5 laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut antara lain laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, laporan realisasi anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penulis berfokus menyelidiki salah satu laporan keuangan tersebut yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun BNN Kota Samarinda. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui pemaknaan Laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda. Penulis bertanya

kembali kepada ibu MN bagaimana penyusunan laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda menggunakan aplikasi SAIBA untuk di tahun 2021. Beliau menjawab sebagai berikut.

“Laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi SAI, terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL) terdiri dari LRA, Neraca, LO dan LPE serta CALK. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Proses penyusunan Laporan realisasi di aplikasi saiba berdasarkan dari SPM (surat Perintah Membayar) yang diajukan ke KPPN dan sudah disetujui dan memiliki nomor register (Nomor SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana. dan di input di aplikasi Saiba berdasarkan akun dari Pagu yang dicairkan”.

Penulis berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh ibu MN di atas tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan laporan realisasi anggaran pada BNN Kota Samarinda disusun menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Intansi (SAI), terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL) terdiri dari LRA, Neraca, LO dan LPE serta CALK. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Pengimput memasukan akun yang sesuai dengan SPM, misalnya pengimputan pada pendapatan. Pengimputan pendapatan tersebut harus sesuai dengan akun pendapatan

yang ada di aplikasi SAIBA akun pendapatan. Begitu juga dengan akun lainnya seperti belanja dan pembiayaan harus disesuaikan dengan akunnya masing-masing. Kemudian jumlah nominalnya harus sesuai dengan jumlah nominal yang disetorkan.

Dalam peraturan PSAP No. 13 paragraf 15 menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh BNN Kota Samarinda. Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu MN selaku bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda, beliau menjelaskan bahwa.

“Laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda dilaporkan per semester I, semester komparatif, semester II, dan tahun komparatif”.

Penulis melihat bahwa untuk pelaporan laporan keuangan BNN Kota Samarinda sudah sesuai dengan PSAP No. 13 mengenai pelaporan laporan keuangan.

4.1.3. Anggaran LRA BNN Kota Samarinda

Penulis melanjutkan pertanyaan dengan menanyakan tentang anggaran LRA BNN Kota Samarinda. Anggaran merupakan suatu perencanaan yang disusun secara teratur meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan yang akan datang. Penulis bertanya bagaimana dengan anggaran BNN Kota Samarinda apakah sangat membantu dalam menjalankan roda organisasi BNN Kota Samarinda.

“Pada BNN Kota Samarinda penyusunan anggaran sudah mengacu PSAP nomor 02. Anggaran tersebut dipergunakan dalam fungsi manajemen seperti pengelolaan pendapatan dan belanja, guna untuk menggerakkan roda organisasi BNN Kota Samarinda”

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu MN selaku Bendahara BNN Kota Samarinda menginformasikan bahwa anggaran sangat membantu sekali dalam manajemen dan juga mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan, hal tersebut digunakan untuk menjalankan intansi BNN Kota Samarinda sesuai dengan prosuder dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam peraturan PSAP No. 02 paragraf 19 menjelaskan bahwa akuntansi anggaran merupakan metode pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen terhadap anggaran yang digunakan untuk membantu pengolahan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Dalam PSAP No. 02 paragraf 21 menjelaskan Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran tersebut disahkan dan anggaran tersebut dialokasikan.

“Anggaran pada BNN Kota Samarinda tersebut tidak bisa kami gunakan sebelum anggaran tersebut diketok palu oleh orang-orang pusat. Setelah disetujui anggaran kami baru kami bisa mempergunakannya”

Dalam pembahasan wawancara dengan ibu MN selaku bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda yang menjelaskan bahwa anggaran tersebut harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat setelah disetujui, baru bisa dicairkan dan dipergunakan.

Berdasarkan pemaparan materi yang dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa akuntansi anggaran BNN Kota Samarinda sudah sesuai dengan peraturan PSAP. Anggaran-anggaran tersebut dipergunakan dalam menjalankan fungsi satuan kerja BNN Kota Samarinda dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Pendapatan LRA BNN Kota Samarinda

Penulis berfokus menanyakan lebih dalam lagi mengenai laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda untuk akun pendapatan. Ibu MN selaku bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda pasti lebih memahami mengenai pendapatan apa saja di BNN Kota Samarinda serta bagaimana pencatatan akuntansinya. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda yaitu ibu MN, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk proses penyusunan laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda untuk akun pendapatan. Misalnya dalam sebulan BNN Kota Samarinda menerima pendapatan dari pelayanan masyarakat Rp30.000.000,00. Kemudian bendahara berdasarkan jumlah pendapatan tersebut membuat kode billing. Kode billing tersebut berfungsi untuk mendapatkan nomor rekening untuk ditransfer ke kas negara. Berdasarkan nomor rekening tersebutlah bendahara mentransfer pendapatan ke kas negara melalui bank”

Tidak lupa Ibu MN menjelaskan juga bagaimana proses penyusunan LRA untuk pos pendapatan dan pencatatan pendapatan. beliau menjelaskan bahwa:

“Proses penyusunan LRA untuk akun pendapatan, kembali lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan kita menyusun LRA itu menggunakan aplikasi SAIBA, nah kita tuh hanya memasukan jumlah nominal ke akun yang sudah tersedia pada aplikasi tersebut, misalnya di bulan Januari BNN Kota Samarinda menerima pendapatan 30 juta, nah kita tuh memasukan nominal tersebut pada akun pendapatan dan harus teliti baik tanggal, bulan, tahun, dan nama akunnnya. Begitu juga untuk bulan seterusnya. Pada BNN Kota Samarinda di tahun 2021 pendapatan diakui pada saat pendapatan diterima bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda setelah itu bendahara menyetorkan ke kas negara melalui bank. Kemudian untuk pengukuran pendapatan pada BNN Kota Samarinda diukur dan dicatat menggunakan azas bruto”.

Proses penyusunan laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda untuk pendapatan sesuai yang dijelaskan oleh ibu MN. Penulis memahami bahwa proses pencatatan pendapatan dicatat pada aplikasi SAIBA. Pendapatan tersebut harus dicatat pada aplikasi SAIBA akun pendapatan sesuai jumlah nominalnya. Begitu juga dengan bulan berikutnya apabila ada pendapatan yang didapatkan BNN Kota Samarinda, dicatat sesuai dengan tanggal pelaporannya.

Kemudian untuk pengakuan pendapatan BNN Kota Samarinda sesuai dengan PSAP No. 13 paragraf 21 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum (BLU). Penulis juga menyimpulkan untuk pengukuran yang dilakukan BNN Kota Samarinda telah sesuai dengan PSAP No 13 paragraf 25 yang menjelaskan bahwa akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membekukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Ibu MN juga memberikan data mengenai laporan realisasi anggaran untuk pendapatan yang diterima BNN Kota Samarinda untuk tahun 2021. Pemberian laporan realisasi anggaran pendapatan tersebut dimaksudkan oleh ibu MN untuk menunjukkan bahwa pada BNN Kota Samarinda dalam pelaporan keuangan BNN Kota Samarinda sangat transparan dan akuntabel artinya apa, informasi mengenai laporan keuangan BNN Kota Samarinda mudah untuk didapat. Penulis mempelajari dan memaparkan mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan BNN Kota Samarinda untuk tahun

2021. Pada BNN Kota Samarinda pendapatan yang diterima BNN Kota Samarinda adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang diterima diantaranya penulis jabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kasi pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat.

Pada BNN Kota Samarinda pendapatan yang berasal dari pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) lainnya sebesar Rp1.425.000,00. Salah satu Pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pelelangan barang milik negara oleh BNN Kota Samarinda, hasil dari pelelangan tersebut disetorkan ke bendahara penerimaan kemudian bendahara penerimaan menyetorkan ke kas negara melalui bank.

- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat.

Pada BNN Kota Samarinda pendapatan jasa lainnya sebesar Rp27.840.000,00. Salah satu pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) kepada masyarakat. Hasil pendapatan tersebut disetorkan ke bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerimaan membuat kode bilik sesuai jumlah pendapatan tersebut untuk melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank.

- c. Pendapatan BLU lainnya.

Pada BNN Kota Samarinda pendapatan lain-lain sebesar Rp4.500.000,00. Salah satu pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali barang belanja tahun anggaran yang lalu.

Itulah pemaparan mengenai pendapatan apa saja yang diterima BNN Kota Samarinda untuk tahun 2021. Berhubung jam mendekati sholat zhuhur penulis menyudahi wawancara tersebut dengan ibu MN. Banyak sekali informasi yang penulis peroleh dari wawancara tersebut. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu MN yang sudah mau diminta waktunya untuk melakukan wawancara dan mohon pamit untuk pulang.

4.1.5. Belanja LRA BNN Kota Samarinda

Pada kunjungan ke tiga penelitian pada BNN Kota Samarinda penulis berencana mewawancarai bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda. Beliau bernama ibu NJ seseorang wanita hebat. Beliau dalam aktivitas kerjanya saat itu sedang mengandung seorang bayi yang diperkirakan usia kandungannya menginjak 8 bulan. Sungguh seseorang wanita hebat yang saat itu penulis temui. Pagi itu jam 10.00 penulis mengunjungi ruangan beliau, tampak ruangan tersebut sangat sejuk dan bersih. Penulis menyampaikan maksud dan tujuan untuk bisa diminta waktu wawancara kepada beliau. Beliau bersedia dan mempersilahkan penulis untuk duduk kebetulan beliau saat itu lagi memiliki waktu luang. Penulis duduk sambil menyiapkan bahan dan alat untuk proses wawancara dengan beliau.

Ibu NJ selaku bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda. Beliau mengetahui semua pengeluaran baik itu belanja maupun pembiayaan di BNN Kota Samarinda dan harus melewati izin beliau terlebih dahulu. Beliau lulusan Politeknik Samarinda jurusan Akuntansi, untuk itu beliau sangat familiar dengan pencatatan akuntansi. Penulis memulai wawancara dengan beliau dengan menanyakan terlebih

dahulu bagaimana pengakuan dan pengukuran untuk belanja pada BNN Kota Samarinda. Beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk akuntansi belanja pada BNN Kota Samarinda diakui pada saat anggaran belanja itu dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda tentunya dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pengukuran belanja BNN Kota Samarinda pengukurannya berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang sah”.

Penulis menyimpulkan untuk pengakuan belanja Pada BNN Kota Samarinda Samarinda telah sesuai dengan PSAP No 13 paragraf 39 yang menjelaskan bahwa khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian penulis bertanya mengenai belanja.

“Ibu kan tadi menyebutkan bahwa belanja itu dikeluarkan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, contohnya seperti apa yah ibu, bisa ibu jelaskan”.

Kemudian ibu NJ menjelaskan dengan memberikan ilustrasi dengan nada santai.

“Contohnya BNN Kota Samarinda itu mempunyai 4 bagian seksi, seksi tersebut diantaranya seksi umum, seksi rehabilitas, seksi pemberantas narkoba, dan seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M), masing-masing seksi tersebut mempunyai anggaran masing-masing dalam satu tahun, dan mempunyai rencana kegiatan masing-masing. Kemudian dikumpulkan menjadi satu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) misalnya, seksi pemberantasan membuat kegiatan penyelidikan dan mereka meminta nota dinas, nota dinas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan mereka. Nota dinas tersebut diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan kegiatan, kemudian PPK melihat di RKA bahwa kegiatan itu benar kemudian kegiatan itu disetujui.

PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diserahkan ke bendahara untuk memberikan uang ke seksi pemberantasan. Setelah menerima uang tersebut seksi pemberantasan melakukan kegiatan mereka, setelah kegiatan itu selesai seksi pemberantasan akan membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan (perwakun). Setelah melengkapi berkas-berkas laporan perwakun, baru dikembalikan ke bendahara. Bendahara berdasarkan surat perintah membayar dari PPK, melakukan pencatatan pada aplikasi Sistem Akuntansi Internal Berbasis Akrual (SAIBA), setelah terkumpul berkas-berkas dari seksi lainnya maka dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA), setelah berkasnya cukup maka berkas tersebut di serahkan ke PPSPM dan dicek olehnya, setelah benar Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) membuat SPM dan dikirimkan ke KPPN untuk diproses pencairan uangnya.”

Berdasarkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh ibu NJ tersebut. Proses pengeluaran belanja pada BNN Kota Samarinda sampai bisa disahkan dan dibelanjakan sangatlah panjang. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan apabila ada oknum yang ingin melakukan korupsi di lingkungan BNN Kota Samarinda.

Kemudian penulis meminta data mengenai Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda khusus belanja untuk dianalisis. Beliau mengizinkan hal tersebut, bukan hanya laporan realisasi anggaran belanja saja, melainkan laporan realisasi anggaran BNN kota Samarinda untuk tahun 2021 beliau berikan kepada penulis. Berdasarkan analisis penulis mengenai laporan realisasi anggaran belanja BNN kota Samarinda tahun 2021, penulis jabarkan sebagai berikut.

Pada BNN Kota Samarinda di tahun 2021 belanja diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pada pencatatan dalam laporan realisasi anggaran pada pos belanja BNN Kota samarinda, pos belanja di bagi menjadi

empat seksi, diantaranya seksi umum, seksi pemberantas, seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), dan seksi rehabilitas.

1. Belanja Pegawai

Pada BNN Kota Samarinda untuk pos pencatatan beban gaji tidak melakukan pencatatan tersebut. Dikarenakan pencatatan beban gaji dicatat didalam laporan realisasi anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur. Bukan hanya pencatatan beban gaji BNN Kota Samarinda saja dicatat dalam laporan realisasi anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur melaikan seluruh satuan kerja BNN lainnya yang berada di bawah BNN Provinsi Kalimantan Timur.

2. Belanja Modal

Pos ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan asset intansi, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya, dengan anggaran dan realisasi anggarannya sebesar Rp13.397.660,00 pada tahun 2021 turun sebesar Rp159.698.340,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran tahun 2020 sebesar Rp173.096.000,00. Belanja modal yang dilakukan BNN Kota Samarinda sebesar Rp13.397.660,00 digunakan dalam belanja modal peralatan mesin dalam layanan sarana internal.

3. Belanja Barang

Pos ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan

untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada tahun 2021 anggaran dan realisasi anggaran belanja barang pada BNN Kota Samarinda sebesar Rp1.862.008.245,00 pada tahun 2021 turun sebesar Rp31.848.264,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 Rp1.893.856.509,00. Belanja modal ini dipergunakan masing-masing seksi diantaranya sebagai berikut:

a. Seksi Umum

Pada seksi umum belanja barang yang sudah terlaksana untuk tahun 2021 sebesar Rp1.182.842.543,00. Belanja barang tersebut dipergunakan untuk keperluan program dukungan manajemen dalam pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, belanja barang untuk keperluan program layanan umum, belanja barang untuk keperluan program pengembangan organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia, belanja barang untuk keperluan program penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN, belanja barang untuk keperluan program layanan monitoring dan evaluasi internal, belanja barang untuk keperluan program penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana, belanja barang untuk keperluan program layanan umum, dan yang terakhir belanja barang untuk keperluan program kehumasan dan keprotokolan.

b. Seksi Pemberantasan

Pada seksi pemberantasan belanja barang yang terlaksana untuk tahun 2021 sebesar Rp162.175.702,00. Belanja barang tersebut diperbelanjakan untuk keperluan

pengawasan tahanan dan barang bukti dan keperluan program penyelidikan jaringan gelap narkoba.

c. Seksi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada seksi P2M belanja barang yang terlaksana untuk tahun 2021 sebesar Rp360.853.000,00. Belanja barang tersebut diperbelanjakan sebagai berikut; belanja barang untuk keperluan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, belanja barang untuk keperluan fasilitasi dan pembinaan pemerintah desa, belanja barang untuk keperluan program pemberdayaan serta peran masyarakat, dan belanja barang untuk keperluan program pengelolaan informasi dan edukasi dalam masyarakat.

d. Seksi Rehabilitas

Pada seksi rehabilitas belanja barang yang terlaksana untuk tahun 2021 sebesar Rp157.426.000,00. Belanja barang tersebut diperbelanjakan antara lain; Belanja barang untuk keperluan program penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintahan, belanja barang untuk keperluan program penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, belanja barang untuk keperluan program fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat, dan belanja barang untuk keperluan program penguatan lembaga rehabilitas komponen masyarakat.

Dari pemaparan rincian belanja yang dijelaskan penulis tersebut dapat disimpulkan. BNN Kota Samarinda sudah mengklasifikasikan belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi sesuai dengan PSAP No 13 paragraf 41, yaitu belanja pegawai.

belanja barang, dan belanja modal dan dijelaskan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK).

4.1.6. Surplus/Defisit LRA BNN Kota Samarinda

Penulis beralih bertanya ke pos surplus/defisit. Surplus/defisit anggaran adalah selisih yang terjadi antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit merupakan selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pada BNN Kota Samarinda penulis melihat di dalam LRA tidak menampilkan pos surplus/defisit. Penulis penasaran mengenai itu, dan bertanya secara langsung ke ibu NJ selaku bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda.

“Untuk pencatatan pada pos surplus/defisit BNN Kota Samarinda ibu mengapa di dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda tidak menampilkan pos surplus/defisit”.

Dalam hal ini Ibu NJ menjelaskan mengenai surplus/defisit BNN Kota Samarinda, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Memang dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda pencatatan pos surplus/defisit tidak dilaporkan dalam LRA BNNK Samarinda. BNN Kota Samarinda pada tahun 2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran selalu mengalami defisit, hal ini dikarenakan belanja pada BNN Kota Samarinda lebih besar dibandingkan pendapatan pada BNN Kota Samarinda. BNN Kota Samarinda merupakan organisasi nirlaba sehingga tidak mengutamakan keuntungan melainkan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Wilayah Kota Samarinda”.

Beliau juga menambahkan penjelasan mengenai tolak ukur keefektifan penggunaan anggaran pada BNN Kota Samarinda.

“Pada BNN Kota Samarinda ini untuk mengukur keefektifan mengenai penggunaan anggaran kami ukur berdasarkan persentase penggunaan anggaran. Misalnya pada tahun ini anggaran kami disepakati sebesar 1 miliar dalam setahun. Kami harus menggunakan 1 miliar tersebut semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami. Semakin besar persentase penyerapan anggaran, semakin bagus kami menjelankan organisasi BNN Kota Samarinda.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh ibu NJ selaku Bendahara penerimaan BNN Kota Samarinda. Penulis menyimpulkan bahwa benar apabila di laporkan dalam LRA BNN Kota Samarinda akan selalu mengalami defisit, hal ini karena pendapatan yang didapat BNN Kota Samarinda tidak bersangkutan dengan belanja BNN Kota Samarinda. Belanja BNN Kota Samarinda sendiri berasal dari anggaran murni yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintahan Pusat, tidak berasal dari pendapatan BNN Kota Samarinda sehingga tidak saling berhubungan. Untuk mengukur keefektifan dalam penggunaan anggaran pada BNN Kota Samarinda. Semakin besar persentase dalam penyerapan anggaran maka semakin baik dalam BNN Kota Samarinda menjalankan fungsi dan tugasnya. Kemudian wawancara ditutup dikarenakan waktu sudah mendekati waktu sholat zhuhur.

4.1.7. Pembiayaan LRA BNN Kota Samarinda

Penulis melakukan wawancara lagi kepada ibu NJ selaku bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda terkait membicarakan mengenai pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penulis bertanya mengenai pembiayaan pada BNN Kota Samarinda. “Pembiayaan apa saja yang dilakukan BNN Kota Samarinda di tahun 2021”.

Ibu NJ selaku bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda menjelaskan bahwa.

“Dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda untuk di tahun 2021 tidak ada pencatatan dalam bentuk nominal untuk pos pembiayaan dek, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam pengoprasian BNN Kota Samarinda selama tahun 2021 tidak pernah melakukan transaksi seperti perolehan pinjaman, investasi jangka panjang, dan investasi jangka pendek, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga tidak ada pencatatan pada pos pembiayaan atau bisa dikatakan nol/tidak ada transaksi dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda pada tahun 2021”.

Setelah mendapat informasi mengenai pembiayaan, penulis memeriksa laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda. Dilihat dari laporan tersebut benar, bahwa untuk pencatatan pos pembiayaan tidak ada keterangan nominal dalam laporan realisasi anggaran tersebut dalam hal ini nol. Berdasarkan wawancara dan data laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda tahun 2021 penulis menyimpulkan bahwa. Selama tahun 2021 BNN Kota Samarinda tidak melakukan transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga dalam laporan realisasi anggaran pada pos pembiayaan BNN Kota Samarinda dilaporkan nol.

4.1.8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) LRA BNN Kota Samarinda

Penulis tidak lupa menanyakan SiLPA/SiKPA pada BNN Kota Samarinda. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. (SiLPA/SiKPA) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Penulis melihat dan mempelajari Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda. Penulis bingung mengapa di LRA BNN Kota Samarinda untuk pos SiLPA/SiKPA tidak ada. Penulis melakukan wawancara berikutnya kepada ibu NJ untuk menanyakan. “Bagaimana pencatatan pos SiLPA/SiKPA pada BNN Kota Samarinda”. Beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Untuk pencatatan pada pos SiLPA/SiKPA di BNN Kota Samarinda tahun 2021 dalam laporan realisasi anggaran tidak mencatat mengenai Pos SiLPA/SiKPA dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan intansi tersebut. BNN Kota Samarinda tidak ada pencatatan transaksi pembiayaan anggaran maupun pengeluaran anggaran sehingga tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda. Tapi apabila terjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan baru kami catat. Untuk beberapa tahun lalu tidak ada BNN Kota Samarinda melakukan transaksi seperti perolehan pinjaman, investasi jangka panjang, dan investasi jangka pendek. Pencatatan pos SiLPA/SiKPA tetap dilaporkan pada LRA BNN Kota Samarinda dengan nama akun Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)”.

Penulis menyimpulkan bahwa pencatatan SiLPA/SiKPA pada BNN Kota Samarinda dicatat nol atau tidak ada pencatatan transaksi. Akan tetapi tetap dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda. Pelaporan tersebut masuk kedalam pos pembiayaan dengan nama akun pembiayaan dalam negeri (neto). Tidak mengikuti format pada umumnya, yang memisahkan antara pos pembiayaan dan pos SiLPA/SiKPA. Penulis menyudahi wawancara tersebut dengan Ibu NJ dan memohon

izin untuk pulang. Tidak lupa penulis berterimakasih dan berpamitan kepada Ibu MN, Bapak MD, dan staf pegawai lainnya sambil berfoto bersama.

Setelah melakukan penelitian di BNN Kota Samarinda. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang penulis ambil selama di BNN Kota Samarinda. Mereka sangat ramah dan sopan dalam melayani permintaan penulis untuk diwawancarai dan dimintai data. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, terimakasih BNN Kota Samarinda *war on durgs*.

Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda Tahun 2021 dengan PSAP.

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)	LRA BNN Kota Samarinda Tahun 2021
Laporan Realisasi Anggaran		
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, dan SiKPA/SiLPA	PSAP No. 13 Paragraf 17 Laporan realisasi anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan	PSAP No. 02 paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran harus mengidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya. 2. Cangkupan entitas pelaporan. 3. Periode yang dicakup. 4. Mata uang pelaporan. 5. Satuan angka yang digunakan 	Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya 2. Cangkupan entitas pelaporan 3. Periode yang dicakup 4. Mata uang pelaporan 5. Satuan angka yang digunakan
Periode pelaporan	PSAP No 13 paragraf 15 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun	Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

Ketepatan waktu penyajian	PSAP No. 02 paragraf 12 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
Akuntansi Anggaran		
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 13 Paragraf 18 Laporan realisasi anggaran sekurang-sekurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Surplus/defisit-LRA 4. pembiayaan 5. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Pembiayaan Untuk pos surplus/defisit dan SiLPA/SiKPA, BNN Kota Samarinda tidak melaporkan pos tersebut karena tidak diperlukan dalam LRA BNN Kota Samarinda.
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP No. 02 paragraf 19-20 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 30 Akuntansi pendapatan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen	Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen
Akuntansi Pendapatan-LRA		
Pengakuan	PSAP No. 13 Paragraf 21 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah.	Pengakuan pendapatan pada BNN Kota Samarinda yaitu pendapatan-LRA diakui pada saat diterima bendahara penerimaan kemudian disetorkan ke kas negara.

Pengukuran	PSAP No. 13 paragraf 24 akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
Akuntansi Belanja		
Pengakuan	PSAP No. 13 paragraf 39 Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum.	Pada BNN Kota Samarinda belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Khususnya melalui bendahara pengeluaran umum BNN Kota Samarinda dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasikan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Pengukuran belanja berdasarkan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam dokumen anggaran yang sah
Penyajian	PSAP No. 13 paragraf 40 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja Modal	Belanja dikalsifikasikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang
Akuntansi surplus/defisit-LRA		
Penyajian surplus/defisit-LRA	PSAP No. 13 Paragraf 42 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit- LRA	Pencatatan pos surplus/defisit-LRA tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda.
Akuntansi Pembiayaan		

Penyajian Pembiayaan	PSAP No. 13 paragraf 43 transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi prolehan pinjaman dan/atau penerimaan pembiayaan	Pada BNN Kota Samarinda tidak ada transaksi perolehan pinjaman dan/ atau penerimaan pembiayaan.
Akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP No. 13 paragraf 48 Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat ke dalam pos pembiayaan dengan nama akun pembiayaan dalam negeri (neto)

Sumber: Data olahan, 2022

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda menggunakan aplikasi SAIBA. Pencatatan tersebut dilakukan secara otomatis untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda.
2. BNN Kota Samarinda telah menyajikan pos pendapatan, belanja, pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA. Untuk pos surplus/defisit tidak disajikan, karena untuk pos surplus/defisit diperuntukkan untuk pencatatan pada pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat bukan untuk BLU. Kemudian untuk pos SiLPA/SiKPA pada BNN Kota Samarinda tetap dilaporkan dengan nama akun penerimaan dalam negeri (neto) masuk ke dalam pos pembiayaan.
3. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda secara keseluruhan sesuai dengan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU khususnya Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP No. 71 tahun 2015. Hanya ada 2 pos yang tidak dilaporkan yaitu di pos surplus/defisit dan SiKPA/SiLPA.

4. Setiap pendapatan yang diperoleh BNN Kota Samarinda dicatat dan diterima oleh bendahara penerimaan, pendapatan tersebut disetorkan ke kas negara melalui bank.
5. Untuk belanja setiap eksi harus mengajukan permohonan surat ke bendahara pengeluaran yang kemudian bendahara pengeluaran mengeluarkan SP2D yang telah disetujui KPA untuk mencairkan dana tersebut.

5.2. SARAN

Penyusunan LRA sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi untuk mengelolah bagian akuntansi di badan keuangan BLU agar pencatatan dan pelaporan keuangan BLU dapat terlaksana dengan baik. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya tidak hanya berfokus ke penerapan strandar akuntansi pemerintahan mengenai laporan realisasi anggaran saja melainkan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti, S., dan Walandouw, S. K. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA*, 3(2), 418–425.
- Barreto, X. F., Correia, C. C., dan Caeiro, C. B. M. (2013). The Second International Conference On Entrepreneurship Analysis Of The Use Of Budget And Budget Realization For Assessing The Financial Performance (A Case Study Covalima District Health Office). *Faculty Of Economics Department Of Accounting Universidade Dapaz , Dili Timor Leste*, 170–177.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Eriyana, M. A. (2019). Analysis Of Corruption In Regional Government In 2016 Related To The Regional Government Budget Realization Report. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.21532/apfjournal.V4i2.116>
- Gamayuni, R. R. (2018). The Effect Of Internal Audit Function Effectiveness And Implementation Of Accrual Based Government Accounting Standard On Financial Reporting Quality. *Review Of Integrative Business And Economics Research*, 7(1), 2414–6722.
- Herdiansyah, H. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. In *Jakarta: Salemba Humanika* (Vol. 8).
- Imanina, A. (2015). Analysis And Implementation Of Statement Government Accounting Standard (PSAP) Number 02 In Budget Realization Report Of Mining And Energy In West Kalimantan. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan (Kiafe)*, 4(2).
- Irawan, M., Made, A., dan Yogivaria, D. W. (2016). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
- Lra – Kemenkeu Learning Center. (N.D.). Retrieved September 13, 2021, From <https://klc.kemenkeu.go.id/bdkptk-perbedaan-lo-dan-lra/>

- Napitupulu, S. M., Zaida, W. N., dan Muda, I. (2019). Model For Presentation Of Central Government Budget Realization Reporting Based on Government Accounting Standards 2019. *International Journal Of Research And Review*, 7(4), 2454–2237.
- Nurseha, A., Adel, J. F., dan Sofia, M. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Kimia Yang Tercatat pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1–13.
- Paidi. (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan). *Skripsi*, 1–97. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7864/1/Skripsi Paidi.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7864/1/Skripsi_Paidi.Pdf)
- Peraturan No 71, P. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Peraturan No 217, PMK. 05 . (2015). *Peraturan Menteri Keuangan No 217 Tahun 2015*.
- Prasetyo, D. (2021). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(3), 50–57.
- Profil - Badan Narkotika Nasional Ri.* (N.D.). Retrieved September 13, 2021, From <https://bnn.go.id/profil/>
- Putri, A. U. S., Yuliandhari, W. S., dan Dillak, V. J. (2017). Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *E-Proceeding Of Management*, 4(3), 2605–2612.
- Rahayu, R. P. (2017). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Makro Manajemen*, 1(1), 55–73.
- Stefani, I. D. (2014). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)*. 1–72.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. *Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung*.

- Sundry, P. (2020). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. *Skripsi*, 1–66.
- Tooy, R. G. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Utomo, R., & Elbash, C. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realsiasi Anggaran Berdasarkan Pp NO. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 155–165.
- Yuniarti, A. (2019). Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Skripsi*, 1–163.
- Sasongko, C., Dan Parulian, S.R. (2015), Anggaran Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2017).
- Sinambela, L. P. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif; Untuk Bidang Ilmu Administrai, Kebijakan Public, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ukmu Sosial Budaya. Graha Ilmu: Yogyakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



BNNK SAMARINDA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA SAMARINDA

Jalan Anggur No. 51 A RT. 57 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda - 77111

Telepon : (62-541) 7272485 ; Faksimili : (62-541) 7272486

e-mail : bnnkota.samarinda@gmail.com website : www.bnn.go.id;
www.samarindakota.bnn.go.id

Nomor : B/1261 /XII/Sb/TU.00.01/2021/BNNK Samarinda, 28 Desember 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada :
Yth : Ketua Program Studi Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Di-
Samarinda

1. Rujukan :

- a) Surat Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 2517/UN17.1/PL/2021, Perihal Penyusunan Skripsi Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan perihal dan rujukan tersebut diatas kami *menyetujui* penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Mulawarman Samarinda untuk melaksanakan penelitian di instansi kami dengan judul **Analisa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Tahun 2021**. A.n M. Adli, NIM. 1801035230.

3. Demikian untuk diketahui, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Samarinda



Muhammad Daud, S.H.,M.H

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak MD

Tanggal : 8 Januari 2022

Jabatan : Kepala BNN Kota Samarinda

Gambaran umum BNN Kota Samarinda

1. Bagaimana visi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan fungsinya bapak?

Jawab

Untuk visi BNN Kota Samarinda itu adalah mewujudkan masyarakat samarinda yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang dan untuk Misi BNN Kota Samarinda itu ialah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitas, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda

2. Bagaimana Misi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan fungsinya bapak?

Jawab

Untuk Misi BNN Kota Samarinda itu ialah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitas, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda.

3. Apa saja tugas dan fungsi wewenang BNN Kota Samarinda?

Jawab

BNN Kota Samarinda mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Dalam melaksanakan tugas BNN Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam wilayah Kota Samarinda,
- melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Samarinda,
- melaksanakan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Kota Samarinda,
- melaksanakan koordinasi,
- melakukan pelayanan administrasi BNN Kota Samarinda, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Samarinda

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ibu MN

Tanggal : 10 Januari 2022

Jabatan : Bendahara Penerimaan BNN Kota Samarinda

Penyusunan laporan realisasi anggaran

1. Bagaimana Proses penyusunan Laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran pada BNN Kota Samarinda?

Jawab

Dalam menjalankan intansi BNN Kota Samarinda wajib mempertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangannya. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran. LRA pada BNN Kota Samarinda itu disusun dan disajikan di dalam aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi yang biasa dipakai untuk mencatat transaksi keuangan di beberapa Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAIBA bertujuan untuk menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa transisi/awal implementasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan berkualitas

2. Bagaimana proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan Aplikasi SAIBA pada BNN Kota Samarinda?

Jawab

Laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi SAI, terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL) terdiri dari LRA, Neraca, LO dan LPE serta CALK. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Proses penyusunan Laporan realisasi di aplikasi saiba berdasarkan dari SPM (surat Perintah Membayar) yang diajukan ke KPPN dan sudah disetujui dan memiliki nomor register (Nomor SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana. dan di input di aplikasi Saiba berdasarkan akun dari Pagu yang dicairkan

3. Apakah dalam penyajian LRA BNNK Samarinda menyajikan pendapatan, belanja, surplus/defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)?

Jawab

Pada BNN Kota Samarinda dalam LRA menyajikan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pos surplus/defisit dan SiLPA/SiKPA, BNN Kota Samarinda tidak melakukan pencatatan tersebut dikarenakan untuk pencatatan surplus/defisit BNN Kota Samarinda merupakan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dana yang didapat murni berasal dari anggaran yang sudah ditetapkan bukan BUMN yang berfokus untuk mencari keuntungan. Untuk SiLPA/SiKPA

BNN Kota Samarinda tidak mencatat pada LRA karena untuk pembiayaan tidak ada transaksi sehingga kami mencatat di LRA untuk pos pembiayaan nol.

4. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran berapa kali laporan realisasi anggaran disajikan dalam satu tahun?

Jawab

Sesuai dengan aplikasi SAIBA kami melaporkan 4 kali yaitu semester I, semesteran kompratif, semester II, dan tahunan kompratif.

Anggaran

1. Bagaimana anggaran yang dipergunakan oleh BNNK Samarinda?

Jawab

Ya anggaran digunakan untuk membantu pengolahan pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Pada BNN Kota Samarinda penyusunan anggaran sudah mengacu PSAP 02. Anggaran tersebut dipergunakan dalam fungsi manajemen seperti pengelolaan pendapatan dan belanja, guna untuk menggerakkan roda organisasi BNN Kota Samarinda

2. Apakah anggaran tersebut sangat membantu dalam pengelolaan organisasi BNNK Samarinda?

Jawab

Ya anggaran sangat membantu sekali dalam menjalankan organisasi BNN Kota Samarinda jika tidak ada anggaran maka kami tidak bisa bergerak.

3. Bagaimana pengesahan anggaran BNN Kota Samarinda

Jawab

Anggaran pada BNN Kota Samarinda tersebut tidak bisa kami gunakan sebelum anggaran tersebut diketok palu oleh orang-orang BNN pusat. Setelah disetujui anggaran kami baru kami bisa mempergunakannya

Pendapatan

1. Bagaimana Proses penyusunan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda?

Jawab

Untuk proses penyusunan laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda untuk akun pendapatan. Misalnya dalam sebulan BNN Kota Samarinda menerima pendapatan dari pelayanan masyarakat Rp30.000.000,00. Kemudian bendahara berdasarkan jumlah pendapatan tersebut membuat kode bilink. Kode bilink tersebut berfungsi untuk mendapatkan nomor rekening untuk ditransfer ke kas negara. Berdasarkan nomor rekening tersebutlah bendahara mentransfer pendapatan ke kas negara melalui bank. Kemudian di catat dan dilaporkan menggunakan aplikasi SAIBA untuk proses pencatatan dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda.

2. Bagaimana Pengakuan pendapatan BNN Kota Samarinda pada saat apa dan bagaimana alur pendapatan tersebut diakui untuk menjadi sebuah pendapatan serta bagaimana pencatatanya di LRA?

Jawab

Pendapatan diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara penerimaan setelah itu bendahara penerimaan menyetorkan ke kas negara melalui bank.

3. Sebutkan dan jelaskan masing-masing jenis pendapatan yang ada di BNN Kota Samarinda serta alur dana tersebut?

Jawab

1. Pendapatan dari penjualan, pada BNN Kota Samarinda pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dari barang barang milik negara yang sudah lewat dari masa manfaatnya, barang barang tersebut dilelang hasil dari pelelangan tersebut disetorkan ke kas negara.
 2. Pendapatan jasa lainnya, pendapatan ini berasal dari pendapatan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti Pembuatan surat SKHPN.
 3. Pendapatan lain lain seperti penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu.
4. Bagaimana pengukuran pendapatan pada BNN Kota Samarinda?

Jawab

Pengukuran pendapatan pada BNNK Samarinda diukur berdasarkan azas bruto yaitu mencatat pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat pada jumlah netonya. Setelah itu Pendapatan disajikan didalam Laporan Realisasi anggaran.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ibu NJ

Tanggal : 13 Januari 2022

Jabatan : Bendahara Pengeluaran BNN Kota Samarinda

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

1. Apakah standar akuntansi yang digunakan BNN Kota Samarinda dalam penyusunan Laporan Keuangan?

Jawab

Ya kami menggunakan PSAP pelaporan keuangan tersebut menggunakan aplikasi SAIBA dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). BNN Kota Samarinda juga membuat laporan pertanggungjawaban atas laporan realisasi anggaran dan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan, jadi dalam satu tahun laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan 12 kali dalam satu tahun ke KPPN

2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan? Khususnya LRA.

Jawab

LRA klo di bendahara ada namanya aplikasi SAS aplikasi sas itu terbagi menjadi 3 bagian. Aplikasi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adminya, dan bendahara. Kalo bendahara sendiri itu aplikasi yang digunakan yaitu SILABI, di aplikasi silabi itu digunakan untuk mencatat segala kuitansi yang masuk dan keluar yang menjadi pertanggungjawaban setiap bulan. Pertanggungjawaban setiap bulan itu yang akan dilaporkan ke KPPN. Dan juga aplikasi SAIBA.

3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA?

Jawab

Secara umumnya ada 5 orang yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan:

1. Bendahara
 2. Oprator
 3. Pejabat pembuat komitmen
 4. PSPM (Pejabat Surat perintah Menbayar)
 5. KPA (kuasa Pengguna Anggaran)
4. Apakah dalam LRA sudah menyajikan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA?

Jawab

Menurut saya bnnk samarinda sudah menyajikan hal-hal tersebut, tetapi ada juga beberapa yang tidak dilaporkan seperti surpus/defisit dan SiLPA/SiLPA.

5. Apakah kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

Jawab

Ada yang terlambat ngumpul berkas atau aplikasi eror dan juga ada fenomena yang mempengaruhi kebijakan seperti pandemic.

6. Berapa kali LRA disajikan dalam satu tahun?

Jawab

Ya tergantung yang minta tapi dari bendahara ke kkpn 12 kali, dari saiba 12 kali jadi satu persatu bulan. Jadi diawal bulan itu ada namanya laporan pertanggungjawaban dan rekonsiliasi.

7. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi LRA?

Apakah sudah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan?

Jawab

Jadi setiap semester itu penyusunan LK ke pusat tapi untuk tahun ini ada LK per triwulan dan semester yang dijelaskan lewat aplikasi saiba dan dijelaskan juga di CLAK.

8. Bagaimana LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran?

Jawab

Kami menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh atasan maka kami menjalankan secara optimal dan standar

9. Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, apakah dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan realisasi anggaran?

Jawab

Klo dari bnnk samarinda itu ada tetapi jarang misalnya di tahun ini di kasih anggaran 2 Miliar dan ditengah tengah perjalanan ada kegiatan yang

menghambat seperti pandemi maka sebagian anggaran tersebut diarahkan ke pandemic, dan pencatatannya dijelaskan di CLAK.

10. Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, apakah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan?

Jawab

Menurut saya penjelasan yang di CLAK itu secara umum saja tetapi hal hal teknis tidak perlu

Belanja

1. Bagaimana Pengakuan belanja BNN Kota Samarinda pada saat apa dan bagaimana alur mekanisme sehingga belanja tersebut diakui untuk menjadi sebuah belanja serta bagaimana pencatatanya di LRA?

Jawab

Belanja pada BNN Kota Samarinda diakui pada saat anggaran belanja itu dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BNN Kota Samarinda tentunya dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan

2. Bagaimana pengukuran belanja pada BNNK Samarinda dicatat?

Jawab

BNN Kota Samarinda pengukurannya berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang sah.

3. Sebutkan dan jelaskan masing-masing jenis belanja yang ada di BNNK Samarinda?

Jawab

Untuk BNN Kota Samarinda Jenis belanja BNN Kota Samarinda ada 3 yaitu:

- Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

- Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

- Belanja barang

Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

4. Mengapa pada laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda tahun 2021 pada belanja pegawai tidak ada transaksi yang dilaporkan?

Jawab

Untuk belanja pegawai pada BNN Kota Samarinda untuk tahun 2021 masih belum dicatat di LRA BNN Kota Samarinda akan tetapi dicatat di BNN provinsi Kalimantan Timur hal ini sesuai dengan kebijakan dari BNN RI kami hanya mengikuti kebijakan yang berlaku.

5. Bagaimana alur pencairan yang ada di BNN Kota Samarinda?

Jawab

Jadi di BNN Kota Samarinda itu ada 4 bagian, seksi umum, seksi rehabilitas, seksi pemberantas, dan seksi P2M. yang masing-masing mempunyai anggaran masing-masing dalam satu tahun dan mempunyai rencana kegiatan masing-masing dan kemudian dikumpulkan menjadi satu RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) misalnya Seksi berantas membuat kegiatan penyelidikan dan mereka meminta nota dinas, nota dinas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan mereka, anggaplah mereka meminta 5 juta, nota dinas tersebut diserahkan ke PPK untuk melaksanakan kegiatan, kemudian PPK melihat di RKA bahwa kegiatan itu benar kemudian kegiatan itu disetujui. PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diserahkan ke bendahara untuk memberikan uang ke sesi berantas. Setelah menerima uang melakukan kegiatan, setelah kegiatan itu selesai seksi berantas akan membuat laporan perwakun (pertanggungjawaban keuangan) setelah melengkapi berkas berkas laporan perwakun baru dikembalikan ke bendahara. Bendahara berdasarkan surat perintah membayar dari PPK tadi dicatatlah di aplikasi SILABI, setelah terkumpul berkas berkas dari seksi lainnya maka dibuat (SPP) surat perintah

pembayaran yang ditanda tangani KPA setelah berkasnya cukup maka berkas tersebut di serahkan ke PPSPM dan dicek olehnya setelah benar PPSPM membuat SPM dan dikirimkan ke KPPN untuk di proses pencairan uangnya. Misal BNN Kota Samarinda mempunyai anggaran 100 juta nah dari ranse tersebut 50 juta untuk persediaan selama satu tahun. Nanti bendahara, KPA, dan PPSPM masing masing mempunyai bagian untuk membuat SPM untuk mencairkan uang persediaan. Uang persediaan tersebut di putar selama 1 tahun untuk menjalankan kegiatan. Misalnya setiap seksi memerlukan dana 10 juta dalam seminggu jadi total 40 juta, 40 juta itu berdasarkan kuitansinya maka di buat lagi SPM biar diganti dengan uang persediaan. Jadi setiap bulan itu ada revolving dan wajib itu minimal 50% dari anggaran yang disepakati.

6. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa dalam catatan atas laporan keuangan?

Jawab

Di CLAK tu kita catat misalnya ada laporan yang mengalami pelaporan yang tidak biasa seperti Pandemi, itu bias dilaporkan dalam CLAK.

Surplus/Defisit

1. mengapa Pada tahun 2021 BNNK Samarinda tidak menampilkan surplus/defisit?

Jawab

Memang dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda pencatatan pos surplus/defisit tidak dilaporkan dalam LRA BNNK Samarinda. BNN Kota

Samarinda pada tahun 2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran selalu mengalami defisit, hal ini dikarenakan belanja pada BNN Kota Samarinda lebih besar dibandingkan pendapatan pada BNN Kota Samarinda. BNN Kota Samarinda merupakan organisasi nirlaba sehingga tidak mengutamakan keuntungan melainkan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Wilayah Kota Samarinda. Kemudian kami mencatat dan melaporkan transaksi sesuai dengan pedoman yang diajarkan kepada kami.

2. Jadi bagaimana mengukur keefektifan penggunaan anggaran pada BNN Kota Samarinda?

Jawab

Pada BNN Kota Samarinda ini untuk mengukur keefektifan mengenai penggunaan anggaran kami ukur berdasarkan persentase penggunaan anggaran. Misalnya pada tahun ini anggaran kami disepakati sebesar 1 miliar dalam setahun. Kami harus menggunakan 1 miliar tersebut semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami. Semakin besar persentase penyerapan anggaran, semakin bagus kami menjalankan organisasi BNN Kota Samarinda.

Akuntansi Pembiayaan

1. Mengapa di dalam laporan realisasi anggaran pada akun pembiayaan LRA BNN Kota Samarinda tahun 2021 tidak ada pencatatan pada pos pembiayaan?

Jawab

Dalam laporan realisasi anggaran BNN Kota Samarinda untuk di tahun 2021 tidak ada pencatatan untuk pos pembiayaan dek, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam pengoprasian BNN Kota Samarinda selama tahun 2021 tidak pernah melakukan transaksi seperti perolehan pinjaman, investasi jangka panjang, dan investasi jangka pendek, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga tidak ada pencatatan pada pos pembiayaan atau bisa dikatakan nol/tidak ada transaksi dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda pada tahun 2021.

2. Jadi bagaimana BNN Kota Samarinda mengukur keefektifitasan kemajuana atau kemunduran kinerjanya?

Jawab

Pada BNN Kota Samarinda ini untuk mengukur keefektifan mengenai penggunaan anggaran kami ukur berdasarkan persentase penggunaan anggaran. Misalnya pada tahun ini anggaran kami disepakti sebesar 1 miliar dalam setahun. Kami harus menggunakan 1 miliar tersebut semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami. Semakin besar persentase penyerapan anggaran, semakin bagus kami menjelankan organisasi BNN Kota Samarinda.

SiLPA/SiKPA

1. Bagaimana SiLPA/SiKPA yang terjadi di BNNK Samarinda tahun 2021?

Jawab

Untuk pencatatan pada pos SiLPA/SiKPA di BNN Kota Samarinda tahun 2021 dalam laporan realisasi anggaran tidak mencatat mengenai Pos SiLPA/SiKPA dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan intansi tersebut. BNN Kota Samarinda tidak ada pencatatan transaksi pembiayaan anggaran maupun pengeluaran anggaran sehingga tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda. Tapi apabila terjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan baru kami catat. Untuk beberapa tahun lalu tidak ada BNN Kota Samarinda melakukan transaksi seperti perolehan pinjaman, investasi jangka panjang, dan investasi jangka pendek. Pencatatan pos SiLPA/SiKPA tetap dilaporkan pada LRA BNN Kota Samarinda dengan nama akun Pembiayaan Dalam Negeri (Neto).

Transaksi Mata Uang Asing

1. Adakah transaksi mata uang asing yang terjadi di BNNK Samarinda untuk tahun 2021?

Jawab

Untuk tahun 2021 BNN Kota Samarinda tidak ada melakukan transaksi mata uang asing.

Lampiran 3. Format Bentuk Umum Laporan Realisasi Anggaran

ILUSTRASI PSAP 13.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxxx	xxxx	xxx	xxxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxxx	xxxx	xxx	xxxx
26					
27	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xxx	xxxx
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35					
36	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
37					
38	PENGELUARAN				
39	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
41	Pengeluaran Penyeretaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
42	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xx	xxx
46	PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xx	xxx
47					
48		xxxx	xxxx	xxx	xxxx

Sumber: KSAP PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran BNN Kota Samarinda Tahun 2021 dan 2020

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
ESELON I : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 689025 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Wednesday,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	27,840,000	33,765,000	5,925,000	121.28	0	6,350,000	6,350,000	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	27,840,000	33,765,000	5,925,000	121.28	0	6,350,000	6,350,000	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	27,840,000	33,765,000	5,925,000	121.28	0	6,350,000	6,350,000	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	1,888,530,000	1,875,405,905	(13,124,095)	99.31	2,091,867,000	2,066,952,509	(24,914,491)	98.81
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	1,875,130,000	1,862,008,245	(13,121,755)	99.30	1,918,770,000	1,893,856,509	(24,913,491)	98.70
B.1.1.c	Belanja Modal	13,400,000	13,397,660	(2,340)	99.98	173,097,000	173,096,000	(1,000)	100.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,888,530,000	1,875,405,905	(13,124,095)	99.31	2,091,867,000	2,066,952,509	(24,914,491)	98.81
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.11	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
 ESELON I : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : 689025 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
 Tanggal : Wednesday,
 Halaman : 2
 Prog.Id : ku_pastkd

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

SAMARINDA, 30 SEPTEMBER 2021
 KEPALA BNN KOTA SAMARINDA

MUHAMMAD DAUD, S.H, M.H
 NRP. 64060427

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

